

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Dinamika sistem internasional memasuki babak baru pada paruh kedua abad 20. Liberalisme sebagai salah satu pilar globalisasi membawa arus perubahan dan meningkatkan hubungan interdependensi antar negara. Kondisi sistem internasional selama beberapa dekade terakhir, menunjukkan bahwa faktor keamanan tidak dapat lagi berdiri sendiri sebagai penentu *state-power*, namun negara perlu menyertakan pula isu-isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setelah sistem ekonomi internasional mengalami revolusi finansial di era 1970-an yang ditandai dengan semakin bebasnya arus modal lintas negara, telah terjadi setidaknya empat kali krisis finansial yang menjadi perhatian para ekonom internasional.<sup>1</sup> Krisis hutang Amerika Latin di era 1970-1980, kegagalan *European Rate Mechanism* sekitar tahun 1992, jatuhnya nilai tukar peso Meksiko tahun 1994, dan terakhir krisis Asia 1997 yang menyebabkan beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara mengalami stagnasi pembangunan dan deindustrialisasi. Bagi kawasan Asia Tenggara, krisis ekonomi 1997 menjadi pelajaran berharga yang meningkatkan kesadaran terhadap adanya mekanisme saling ketergantungan dalam kompleksitas sistem internasional.

Globalisasi dalam kerangka *world politics* tidak dapat dipisahkan dari globalisasi ekonomi.<sup>2</sup> Globalisasi ekonomi juga identik dengan paham liberalisme yang mempromosikan konsep *free trade* dan interdependensi. Globalisasi dapat diindikasikan dengan berkembangnya kebebasan arus modal, percepatan alih teknologi, dan maraknya perkembangan industri telekomunikasi yang pada akhirnya membentuk komunitas masyarakat transnasional dimana batas-batas teritorial negara bukan lagi penghalang untuk mengadakan interaksi, terutama interaksi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pada satu sisi, globalisasi

<sup>1</sup> Robert Gilpin. *Global Political Economy : Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press, New Jersey. 2001. p. 263.

<sup>2</sup> Jan Aart Scholte. *Global Trade and Finance* di dalam *The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations*, 2<sup>nd</sup> edition, edited by John Baylis and Steve Smith. Oxford University Press, New York. 2001. p. 519.

memang membuka kesempatan bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mendapatkan akses pasar, teknologi, dan informasi dari negara-negara yang lebih maju. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi juga meningkatkan kompetisi, bukan hanya kompetisi antara kelompok negara maju dan berkembang, tetapi juga antara sesama negara berkembang. Liberalisasi dan globalisasi telah menjadikan kawan dan lawan sebagai kompetitor. Oleh karena itu, di era yang paling liberal sekalipun, keberadaan dan peran negara tetap dibutuhkan untuk memelihara perekonomian dalam negeri.

Timbulnya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan tren regionalisme semakin menguat. Pembentukan Eropa sebagai *common market* di awal 1993 memberikan 'pencerahan' bahwa suatu negara tidak dapat menghindari dari konsep kerjasama untuk dapat mempertahankan diri dari dampak negatif globalisasi. Negara-negara yang termasuk dalam kawasan Eropa pun berlomba-lomba untuk dapat diakui sebagai anggota *European Union* (Uni Eropa).

Dalam lingkup regionalisme, konsep integrasi ekonomi ASEAN (*Association of South-East Asian Nations*) dan peningkatan kerjasama ekonomi Asia Timur semakin marak dibicarakan. Pada Desember 1997, para pemimpin ASEAN dan negara-negara Asia Timur menyepakati terbentuknya ASEAN+3 melalui *2<sup>nd</sup> ASEAN Informal Summit* di Malaysia. Paket kerjasama tersebut meliputi upaya peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan bidang lainnya. ASEAN+3 melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan tiga negara di kawasan Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.<sup>3</sup> Sementara itu, upaya kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga semakin ditingkatkan dengan dicetuskannya ide integrasi ekonomi ASEAN (*ASEAN Vision*) pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003. Dalam *ASEAN Vision 2020*, masing-masing negara ASEAN menyetujui komitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim perdagangan dan investasi *capital* yang kondusif.<sup>4</sup> Integrasi ekonomi merupakan salah satu poin terpenting yang harus dicapai dalam rangka

<sup>3</sup> *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. <http://www.aseansec.org/16580.htm> (diakses tanggal 6 Mei 2008).

<sup>4</sup> H. Paskah Suzetta. *Keynote speech* dalam Seminar "Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Strategi dan Peluang Korporasi Indonesia" yang diselenggarakan pada 31 Mei 2007 di Jakarta.

merealisasikan ASEAN *Vision 2020*, yaitu tercapainya ASEAN *Economic Community* (AEC), ASEAN *Security Community* (ASC), dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC).<sup>5</sup>

Pada tahun 2007 di Cebu, Filipina, para kepala negara ASEAN meluncurkan sebuah kesepakatan untuk mempercepat terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.<sup>6</sup> Langkah tersebut dinilai beberapa kalangan sebagai langkah yang sangat berani, mengingat upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di ASEAN masih belum optimal. Kesiapan masing-masing negara anggota dalam *open trade* juga masih dipertanyakan. Terlepas dari permasalahan tersebut, upaya pembentukan Pasar Tunggal ASEAN 2015 terus bergulir, antara lain dengan rencana pembentukan ASEAN *Single Window* (ASW) yang diawali oleh *National Single Window* (NSW) di masing-masing negara anggota dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur ekspor-impor dan kepabeanan di lingkungan ASEAN.<sup>7</sup>

Dalam rangka mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negara anggota telah menyepakati pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang dimulai dengan komitmen untuk menurunkan *tariff barrier* hingga mencapai kisaran 0 (nol) hingga 5 persen. Untuk mencapai komitmen Pasar Tunggal ASEAN 2015, kondisi tersebut akan ditingkatkan lagi dengan upaya untuk menghilangkan *tariff* (hingga nol persen) dan *non-tariff barrier* dalam kegiatan perdagangan intra-kawasan. Deklarasi Bali *Concord II* pada tahun 2003 merumuskan ASEAN *Economic Community* sebagai integrasi ekonomi regional yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, dan investasi. Pasar Tunggal ASEAN tidak hanya mengacu pada konsep ASEAN sebagai *single market*, tetapi juga sebagai *single production base* yang akan membutuhkan liberalisasi *capital* dan tenaga kerja ahli.

Penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 diharapkan akan membawa dampak positif bagi kondisi perekonomian regional. Untuk menyukseskan komitmen tersebut, masing-masing negara anggota harus terlebih dahulu menciptakan situasi ekonomi politik yang kondusif di wilayahnya. Namun perlu ditekankan kembali bahwa di antara sesama anggota ASEAN dan bahkan di

<sup>5</sup> *Vientienne Action Program* (VAP), 10<sup>th</sup> ASEAN Summit, Laos-Vietnam, 29 November 2004. <http://www.aseansec.org/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf> (diakses 7 September 2007).

<sup>6</sup> H. Paskah Suzetta, op.cit.

<sup>7</sup> Ibid.

dalam wilayah beberapa negara anggota ASEAN, masih terdapat kesenjangan, misalnya dalam hal pendapatan per kapita masyarakat, tingkat pendidikan, angka kemiskinan, pengangguran, inovasi teknologi, dan level industrialisasi. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN yang tergolong dalam kategori LDCs (*Least Developed Countries*).

Walaupun dapat dikategorikan sebagai konsep yang 'prematurnya', Pasar Tunggal ASEAN sudah dicanangkan. Walaupun wacana pembentukan ASEAN *Economic Community* terus bergulir, beberapa pihak masih meragukan kemampuan negara-negara ASEAN untuk sepenuhnya membentuk kawasan yang *borderless* dan terintegrasi penuh. Pembentukan ASEAN *Economic Community* masih dibayangkan oleh kesuksesan integrasi ekonomi Uni Eropa. Negara-negara anggota ASEAN dipandang sebagai *EU-wannabe* yang terlalu ambisius dalam menetapkan tahun 2020 sebagai dicanangkannya ASEAN *Economic Community*. Wacana integrasi ekonomi Uni Eropa sudah dimulai sejak tahun 1950-an dan membutuhkan waktu hingga 40 tahun untuk mewujudkan konsep tersebut. Ada beberapa aspek dari pembentukan Uni Eropa yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi rencana integrasi ekonomi ASEAN,<sup>8</sup> dan dalam beberapa hal, dapat pula dipandang sebagai penghambat kesuksesan integrasi ekonomi ASEAN. Kawasan Uni Eropa dan ASEAN memiliki motivasi sosial-politik yang jauh berbeda, antara lain, struktur masyarakat ASEAN masih belum lama terbentuk bila dibandingkan dengan formasi kawasan Uni Eropa. Kondisi keuangan yang dimiliki ASEAN juga belum dapat menandingi anggaran finansial negara-negara Eropa. Dari segi sistem ekonomi internasional, kondisi lingkungan internasional saat ini jauh lebih terbuka dibandingkan tahun 1950-an, ketika integrasi ekonomi Uni Eropa mulai dicanangkan. Dari segi sosial-ekonomi, kawasan ASEAN memiliki ketidakseimbangan, karena anggota ASEAN terdiri dari negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang. Kondisi tersebut menciptakan kawasan ASEAN yang terbagi-bagi dalam kelas-kelas sosial tertentu. Namun demikian, ketika dampak positif dan negatif dari rencana untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN 2015 masih perlu dikaji lebih lanjut, masing-masing negara tidak dapat menelaah kembali keikutsertaannya dalam

---

<sup>8</sup> Michael G. Plummer. *Creating an ASEAN Economic Community : Lessons from the EU and Reflections on the Roadmap* di dalam Denis Hew, *Roadmap to an ASEAN Economic Community*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. 2005. pp. 40-42.

komitmen tersebut. Akibatnya, pilihan satu-satunya bagi setiap anggota ASEAN adalah turut serta dalam arus globalisasi dan regionalisme.

Selain upaya untuk mewujudkan konsep Pasar Tunggal, ASEAN juga berupaya untuk meningkatkan aktifitas perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan China melalui pembentukan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) yang akan direalisasikan pada tahun 2010 untuk negara ASEAN-six dan China, dan tahun 2015 untuk kelompok negara CLMV.<sup>9</sup> Dalam memandang kondisi perekonomian ASEAN, faktor perkembangan ekonomi China tidak dapat dikesampingkan. ACFTA juga memperkuat pendapat bahwa pengaruh China di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara semakin kuat. China belum dapat dikategorikan sebagai negara maju, namun pertumbuhan ekonominya yang signifikan dari tahun ke tahun, memberikan *awareness* bagi negara-negara di dunia bahwa China telah tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru. Integrasi ekonomi ASEAN juga disebut-sebut sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dominasi ekonomi China. Di sisi lain, China juga memiliki kepentingan untuk 'mengamankan' kawasan Asia Tenggara sebagai target pasar potensial. Kehadiran ACFTA, seperti halnya rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, juga menghadirkan permasalahan tersendiri, karena aktifitas perdagangan China dan ASEAN mengindikasikan struktur perdagangan yang lebih bersifat kompetitif dibandingkan komplementer.<sup>10</sup> Dengan demikian, 'kehadiran' China di ASEAN akan semakin meningkatkan iklim kompetisi intra-kawasan. Selain bersaing dengan sesama negara ASEAN, masing-masing anggota juga harus berhadapan dengan China. Di satu sisi, konsep Pasar Tunggal dalam upaya integrasi ekonomi ASEAN dapat menjadi 'ancaman' bagi perekonomian nasional anggota ASEAN yang tergolong sebagai negara kurang berkembang. Di sisi lain, integrasi ekonomi ASEAN juga semakin dibutuhkan untuk menghadapi dominasi China.

Beberapa kalangan di Indonesia masih menyatakan sikap yang pesimis terhadap peluang dan daya saing Indonesia dalam liberalisasi perdagangan, khususnya dalam menghadapi China dan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Pada umumnya, usaha besar sudah memiliki akses terhadap sarana dan prasarana industri yang kondusif, sehingga lebih berpeluang untuk meraih keuntungan dari

<sup>9</sup> Alyssa B. Greenwald. *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) : A Legal Response to China's Economic Rise?*. Duke Journal of Comparative and International Law. 2006. <http://www.law.duke.edu> (diakses tanggal 6 Mei 2008).

<sup>10</sup> John Wong dan Sarah Chen di dalam Alyssa B. Greenwald, *op.cit.*

mekanisme Pasar Tunggal. Nilai ekspor non-migas dari sektor usaha besar mencapai 79,72 persen pada tahun 2005.<sup>11</sup> Dengan demikian, peran usaha besar dalam perdagangan internasional Indonesia cukup signifikan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa jumlah perusahaan yang tergolong usaha besar di Indonesia hanya 0,02 persen dari total unit usaha domestik. Sebagian besar unit usaha di Indonesia (99,98 persen)<sup>12</sup> tergolong jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang disebut juga sebagai *Small and Medium Enterprises (SMEs)*.

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor UKM Indonesia tahun 2006, mencapai 96,18 persen terhadap jumlah total lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2006, sektor UKM Indonesia menyumbangkan 53,3 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional, sementara sisanya, yaitu sekitar 46,7 persen merupakan kontribusi sektor Usaha Besar.<sup>13</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UKM merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam memelihara kestabilan sosial dalam negeri. Potensi UKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan peran UKM dalam pembangunan perekonomian nasional merupakan beberapa aspek penting yang melatarbelakangi perlunya pengembangan dan pemberdayaan UKM di Indonesia.

Peran UKM dalam pembangunan nasional tidak dapat diremehkan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Stiglitz bahwa usaha kecil seringkali berperan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat,<sup>14</sup> maka keberadaan dan perkembangannya layak mendapatkan perhatian pemerintah. Negara memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arah perekonomian nasional. Pemerintah berperan dalam mengeluarkan kebijakan dan membangun infrastruktur yang menunjang pengembangan industri, khususnya industri berbasis UKM. Dalam memandang hubungan antara UKM nasional dan perdagangan internasional, konsep Pasar Tunggal ASEAN 2015 harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi sektor UKM dalam negeri.

Peluang, karena konsep Pasar Tunggal ASEAN 2015 sebagai *single market* dan *single production base* memberikan kesempatan bagi sektor UKM

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Indikator Makro UKM 2007*. BRS No.17/03/Th. X, 16 Maret 2007.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Joseph Stiglitz. *Making Globalization Work : The Next Steps to Global Justice*. Allen Lane, Penguin Group, England. 2006. p. 192.

untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui perusahaan-perusahaan multinasional.<sup>15</sup> Dengan kata lain, Pasar Tunggal ASEAN memberikan kesempatan bagi UKM nasional untuk meningkatkan peran, bukan hanya sebagai produsen tunggal, tetapi sebagai produsen (*supplier*) dan mitra kerja bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Kondisi tersebut dapat diartikan pula sebagai upaya peningkatan peran UKM sebagai industri yang padat karya. Pasar Tunggal ASEAN juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi UKM nasional untuk lebih mandiri dan *outward-looking*. Namun perlu ditekankan kembali bahwa untuk memanfaatkan peluang tersebut, sektor UKM harus memiliki daya saing dalam dunia industri dan perdagangan regional, seperti harga yang lebih kompetitif, peningkatan kualitas, serta ketepatan waktu pengiriman (*delivery*). Selain kebutuhan terhadap berbagai fasilitas pendukung, faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan UKM adalah negara (pemerintah), yaitu upaya dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UKM dalam negeri.

Selain peluang, penerapan Pasar Tunggal ASEAN juga memberikan tantangan tersendiri bagi UKM domestik, karena persaingan bukan saja datang dari korporasi asing, namun juga dari UKM regional. Bagi beberapa negara Asia Tenggara, UKM merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian nasional. Di Thailand, proporsi UKM dari seluruh unit usaha adalah 99,5 persen.<sup>16</sup> Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan peran UKM Filipina yang mendominasi usaha domestik, yaitu 99 persen dari total unit usaha.<sup>17</sup> Sementara itu di Malaysia, porsi sektor UKM dalam perekonomian dalam negeri mencapai 60 hingga 70 persen.<sup>18</sup> Pada dasarnya, negara-negara dalam intra-kawasan ASEAN sangat mengandalkan peran UKM domestik dalam mempertahankan

<sup>15</sup> UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*). *Report of the Expert Meeting on the Relationships between SMEs and TNCs to Ensure the Competitiveness of SMEs*. Held at the Palais des Nations, Geneva, 27 to 29 November 2000. TD/B/COM.3/EM.11/3, 20 December 2000. <http://www.unctad.org> (diakses tanggal 7 September 2007).

<sup>16</sup> Chaipat Poonpatpibul and Watsaya Limthammahisorn. *Financial Access of SMEs in Thailand : What Are the Roles of the Central Bank?*. June 2005. SEACEN's collaborative research on SMEs and the role of central bank.

<sup>17</sup> UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*). *Improving the Competitiveness of SMEs Through Enhancing Productive Capacity*, Report by the UNCTAD secretariat. TD/B/COM.3/51/Add.1. 31 Januari 2003. <http://www.unctad.org> (diakses tanggal 7 September 2007).

<sup>18</sup> Star Biz, 15 Agustus 2006. *Malaysian SMEs Poised for Further Growth*, di dalam <http://www.mida.gov.my> (diakses tanggal 3 Maret 2008).

stabilitas ekonomi dan sosial di negaranya masing-masing. Dengan demikian, UKM-UKM regional akan saling berkompetisi untuk merebut peluang yang muncul melalui penerapan Pasar Tunggal ASEAN.

Masalah lainnya akan timbul karena produk unggulan dalam kawasan intra-ASEAN, tidak bersifat saling komplementer, melainkan lebih bersifat kompetitif. Ketika *tariff barrier* diturunkan hingga mencapai 0 (nol) persen dan *non-tariff barrier* dihilangkan dalam rangka mencapai komitmen Pasar Tunggal ASEAN, produk-produk impor (dari korporasi besar maupun UKM regional) dapat membanjiri pasar dalam negeri. Apabila sektor UKM nasional tidak memiliki daya saing dan nilai tambah yang lebih kompetitif, *open trade* dalam mekanisme Pasar Tunggal dapat menjadi semacam *boomerang* bagi keberadaan UKM dalam negeri. Konsekuensi lebih jauh dari kemungkinan tersebut adalah munculnya gejolak sosial, terutama yang ditimbulkan oleh peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, mengingat stabilitas sosial-ekonomi dalam negeri masih sangat tergantung pada peran UKM.

Dalam pembahasan mengenai UKM sebagai aktor ekonomi (*Non-State Enterprise*) internasional, *success story* China dalam pemberdayaan UKM tidak dapat dikesampingkan. China yang saat ini sudah mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan nilai perdagangan China-ASEAN yang cukup signifikan dan meningkatnya investasi China di negara-negara ASEAN telah meningkatkan ketergantungan negara-negara tersebut terhadap kehadiran China sebagai *the new emerging superpower*.<sup>19</sup> Mengenai kesuksesan pengembangan UKM di China, para peserta 4<sup>th</sup> APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) SME Technology Exchange Fair mengakui bahwa sektor UKM China telah menjadi bagian penting dalam rantai industri global.<sup>20</sup> Pada tahun 2005, kontribusi sektor UKM China terhadap perolehan ekspor mencapai 68,3 persen, yang meliputi industri pakaian jadi, kerajinan, dan mainan anak.<sup>21</sup> Atas pertimbangan penghematan biaya, MNCs yang beroperasi di China juga mulai mengalihkan fokus kerjasamanya kepada sektor UKM. Sebagai contoh, 60 persen aktifitas *purchasing* BASF berasal dari China, dan mayoritas berasal dari

<sup>19</sup> Vincent Wei-Cheng Wang di dalam Alyssa B. Greenwald.

<sup>20</sup> *China SMEs Crucial to Transnational Corporation's World Industrial Chain*. Danmex China Business Resource. 2006. <http://www.danmex.org> (diakses tanggal 6 Mei 2008).

<sup>21</sup> Ibid.

sektor UKM.<sup>22</sup> Dalam memandang peran UKM secara internasional, kesuksesan China dapat dijadikan sebagai pendorong integrasi ekonomi dan *lesson learned* bagi pengembangan UKM di ASEAN. Sementara itu di lingkup regional, keberhasilan Thailand dan Malaysia dalam menciptakan sektor UKM yang kompetitif, dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Indonesia.

Masih terbatasnya akses modal, teknologi, dan informasi merupakan sebagian kecil hambatan yang masih dihadapi oleh sektor UKM nasional. Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban dalam memelihara perekonomian nasional juga bertanggung jawab terhadap peningkatan daya saing UKM. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menunjang upaya-upaya pengembangan dan peningkatan daya saing sektor UKM nasional dalam menghadapi era globalisasi. Dalam hal upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor UKM, kebijakan dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan faktor yang paling berpengaruh, seiring dengan komitmen pemerintah untuk turut serta dalam wacana penerapan Pasar Tunggal ASEAN.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Dalam teori liberalisme, kegiatan (kerjasama) ekonomi internasional merupakan satu-satunya cara untuk 'menghidupi' suatu negara, karena pada dasarnya, negara tidak dapat berdiri sendiri. Di era globalisasi ini, pendapatan suatu negara juga semakin tergantung pada aktifitas perdagangan internasional. Dengan demikian, kondisi yang paling ideal akan tercipta dalam hubungan ekonomi yang bersifat komplementer. Pada kenyataannya, hubungan antar negara tidak selalu ideal. Hubungan ekonomi terbuka yang bersifat non-komplementer akan meningkatkan iklim kompetisi antar negara. Hal tersebut dialami pula oleh ASEAN. Integrasi ekonomi yang dimaksudkan untuk membendung kekuatan China, justru berpotensi 'merusak', khususnya bagi sektor industri kecil dan menengah yang berperan sebagai stabilisator sosial ekonomi dunia. Selain dari kalangan usaha regional, persaingan di kawasan ASEAN juga akan semakin berat akibat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar China. Seperti halnya permasalahan yang dihadapi oleh

---

<sup>22</sup> Ibid.

sesama anggota ASEAN, sifat perdagangan China-ASEAN juga cenderung bersifat kompetitif, sementara untuk dapat menghadapi China, ASEAN memerlukan hubungan antar anggota yang kohesif satu sama lain.

Ketika *tariff* dan *non-tariff barrier* dihilangkan dalam mekanisme liberalisasi perdagangan, kemungkinan banjirnya produk impor dengan harga dan kualitas yang lebih kompetitif dapat menghambat peran sektor UKM nasional dalam perdagangan, baik secara domestik maupun dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, produk impor dapat mengambil-alih pangsa pasar domestik yang selama ini diandalkan sebagai basis pemasaran produk UKM dalam negeri. Kalangan usaha dan industri antar negara juga akan berkompetisi untuk memperebutkan pangsa pasar (tujuan ekspor) yang sama.

Untuk bertahan dalam era liberalisasi perdagangan, sektor UKM harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim kompetisi sehubungan dengan semakin kuatnya pengaruh China dan penerapan Pasar Tunggal di ASEAN. Dalam konteks liberalisasi perdagangan, bertahannya sektor UKM domestik akan dipengaruhi oleh dukungan pemerintah dalam peningkatan kapabilitas dan daya saing UKM Indonesia. Di kawasan ASEAN, Thailand dan Malaysia merupakan negara-negara yang tergolong sukses dalam meningkatkan peran dan daya saing sektor UKM-nya secara domestik maupun regional. Sementara kesuksesan China dalam memberdayakan sektor UKM-nya sudah diakui secara global. Pengembangan sektor UKM juga perlu dilihat sebagai upaya pembangunan stabilitas sosial-ekonomi nasional suatu negara. Berdasarkan perumusan tersebut, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu “bagaimana implikasi perkembangan ekonomi China dan rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN terhadap perekonomian nasional dan regional?”, “bagaimana strategi pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia dalam memberdayakan sektor UKM-nya masing-masing?”, dan “strategi domestik dan strategi regional UKM seperti apa yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi China dan rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015?”.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis implikasi perkembangan ekonomi China dan rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 terhadap perekonomian domestik.
2. Mengetahui daya saing sektor UKM Thailand, Malaysia, dan Indonesia dari sudut pandang kebijakan (strategi) masing-masing negara, terutama dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi China dan rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015.
3. Mengetahui pelajaran apa saja yang dapat diambil Indonesia dari strategi pemerintah Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan sektor UKM-nya masing-masing.
4. Menganalisis langkah apa yang perlu segera dilaksanakan untuk membangun sektor UKM dalam negeri dan regional yang lebih kompetitif.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Memberikan pemahaman mengenai dampak liberalisasi perdagangan, khususnya dalam kerangka Pasar Tunggal ASEAN 2015, terhadap sektor UKM dalam negeri.
2. Memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai peran UKM dalam sistem perdagangan internasional, yang selama ini masih didominasi oleh usaha besar dan perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs).

### 1.5. Kajian Pustaka

Dalam dinamika politik internasional, khususnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, ada beberapa hal di luar konteks perdagangan yang perlu mendapat perhatian, yaitu berhubungan dengan sektor UKM, *rural agricultural industry*, dan perubahan kondisi kemiskinan dan ketimpangan di China.<sup>23</sup> Dinamika sistem internasional juga semakin diwarnai dengan bentuk kerjasama perdagangan regional. Menghadapi dunia perdagangan yang semakin kompetitif,

---

<sup>23</sup> Zainuddin Djafar. *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*. Pustaka Jaya, Jakarta. 2008. p. 56.

kerjasama regional merupakan salah satu cara untuk memperlancar kepentingan ekspor suatu negara ke arena global.<sup>24</sup> Lebih lanjut, Djafar menyatakan bahwa semakin maraknya pembentukan *trading bloc* antar negara disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) semakin banyak negara yang menyadari bahwa daya tawar mereka akan semakin tinggi apabila mereka berunding dalam suatu kelompok regional, dan (2) sebagai respon terhadap pembentukan *trading blocs* di kelompok negara lainnya.<sup>25</sup> Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa China memiliki kepentingan khusus di ASEAN, sementara itu anggota ASEAN juga tidak dapat menghindari kerjasama regional untuk menghadapi China. Bentuk kerjasama ASEAN-China telah diwujudkan melalui rencana penerapan ACFTA pada 2010. Permasalahan utama yang dihadapi dalam ACFTA adalah aktifitas perdagangan ASEAN-China yang lebih bersifat kompetitif,<sup>26</sup> sehingga timbul kekhawatiran bahwa ACFTA tidak lebih dari sekedar upaya China untuk mempertahankan kawasan Asia Tenggara sebagai basis pasar potensial.

Di kawasan Asia Tenggara, para pemimpin negara anggota ASEAN telah menyepakati konsep integrasi ekonomi ASEAN sebagai Pasar Tunggal pada 2015. Lima tahun lebih cepat dari komitmen sebelumnya dalam ASEAN *Vision 2020*. Konsep Pasar Tunggal diharapkan dapat berfungsi lebih jauh dari sekedar *Free Trade Area (FTA)* yang telah berlaku sejak tahun 2003. Untuk mencapai komitmen Pasar Tunggal ASEAN, *tariff barrier* akan diturunkan hingga mencapai 0 (nol) persen, sementara *non-tariff barrier* akan dihilangkan secara bertahap. Konsep Pasar Tunggal juga akan meningkatkan level liberalisasi modal, barang, jasa, dan tenaga kerja. Walaupun mekanisme-mekanisme tersebut sejalan dengan perkembangan wacana pembentukan Pasar Tunggal ASEAN, perangkat komunitas untuk mengikat komitmen tersebut masih lemah karena tidak adanya institusi supranasional yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan sanksi bagi negara-negara anggota yang melanggar perjanjian. Searah dengan pemahaman tersebut, Djafar mengemukakan bahwa seperti yang diungkapkan oleh Severino, dua hal yang amat menentukan daya tawar

---

<sup>24</sup> Ibid. p. 63.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Wong dan Chen, lihat [10].

ASEAN dalam menghadapi China adalah solidaritas politik dan integrasi ekonomi di tingkat regional.<sup>27</sup>

Seperti halnya tantangan yang dihadapi dalam ACFTA, salah satu permasalahan lain bagi ekonomi ASEAN adalah produk perdagangan intra-kawasan yang tidak bersifat komplementer, melainkan lebih bersifat kompetitif.<sup>28</sup> ASEAN juga masih mengandalkan negara-negara ekstra-kawasan dalam hal peningkatan teknologi. Pangsa pasar utama untuk produk ekspor ASEAN adalah kawasan Eropa dan Amerika. Nilai perdagangan intra-ASEAN pada tahun 2005, senilai 163,9 milyar USD, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai perdagangan ekstra-ASEAN yang mencapai 484,3 milyar USD.<sup>29</sup>

Dalam menghadapi era globalisasi, sektor UKM dalam negeri maupun regional masih menghadapi beberapa hambatan. Ketika *non-tariff barrier* diminimalisasi dalam rangka memenuhi komitmen Pasar Tunggal, negara (pemerintah) juga dituntut untuk menghentikan pemberian subsidi bagi sektor industri dalam negeri. Dengan demikian, untuk menghadapi kompetisi akibat integrasi ekonomi ASEAN, sektor UKM harus mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme *open trade* dalam liberalisasi perdagangan.

Pada dasarnya, sektor UKM sudah diakui sebagai penunjang stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, jumlah unit usaha berbasis UKM mendominasi jumlah unit usaha nasional secara keseluruhan, misalnya di Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Jerman, dan Kanada, jumlah unit usaha kecil dan menengah melampaui angka 95 persen dari total unit usaha.<sup>30</sup> Sektor UKM yang berasal dari negara-negara maju, seperti halnya di negara berkembang, menyediakan jumlah lapangan kerja yang cukup signifikan. Mengenai pengembangan UKM di China, Djafar menyatakan bahwa hampir dua per tiga kegiatan ekonomi China didominasi oleh sektor UKM, dengan demikian sektor UKM merupakan komponen industri yang paling aktif dalam perekonomian

<sup>27</sup> Zainuddin Djafar, *op.cit.* p. 54.

<sup>28</sup> Lay Hong Tan. *Will ASEAN Economic Integration Progress Beyond A Free Trade Area? The International and Comparative Law Quarterly*; Oct 2004; 53,4; Academic Research Library. pg. 935.

<sup>29</sup> *Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Analisis Daya Saing Indonesia*, disampaikan pada Seminar "Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Strategi dan Peluang Korporasi Indonesia". Jakarta, 31 Mei 2007.

<sup>30</sup> UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*). *Improving the Competitiveness of SMEs Through Enhancing Productive Capacity*, Report by the UNCTAD secretariat. TD/B/COM.3/51/Add.1. 31 Januari 2003.

China, termasuk dalam kegiatan inovasi teknologi.<sup>31</sup> Dari sudut pandang sosial-ekonomi, sektor UKM di China merupakan 'jalan pintas' bagi terciptanya inovasi dan pembukaan lapangan kerja, karena sifat-sifat sektor UKM yang pada umumnya merupakan industri padat karya, membutuhkan *low occupational requirements*, tidak memerlukan teknologi canggih atau investasi dalam jumlah besar, serta dapat membangun rantai lapangan pekerjaan melalui pertumbuhan sektor UKM lainnya, terutama dalam sektor jasa.<sup>32</sup>

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, sektor UKM didorong untuk lebih proaktif dan produktif. Upaya internasionalisasi dan pengembangan UKM di negara-negara berkembang seringkali terhambat oleh kondisi infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmelash Beyene mengenai peningkatan daya saing sektor UKM di kawasan Afrika.<sup>33</sup> Beyene mengungkapkan bahwa walaupun memiliki potensi untuk maju, sektor UKM di Afrika masih mengalami berbagai hambatan untuk mengembangkan diri dalam era globalisasi. Hambatan tersebut berasal dari kurangnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan sektor UKM. Lingkup kebijakan nasional seringkali kurang selaras dengan kebutuhan internasional. Hambatan lainnya adalah infrastruktur yang sangat terbatas. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjembatani akses terhadap teknologi informasi, akses transportasi (logistik), dan *power supply*, dinilai sebagai hambatan bagi peningkatan daya saing UKM. Sektor finansial di Afrika juga belum dapat diakses secara merata. Aspek lainnya yang perlu segera ditingkatkan adalah kemampuan manajemen pemasaran, akses teknologi, dan akses terhadap peningkatan keahlian.

Tidak ada satu cara spesifik yang paling efektif dalam upaya pengembangan UKM.<sup>34</sup> Setiap negara memiliki tata aturan dan kebijakan yang berbeda terhadap peran UKM dalam perdagangan internasional. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya definisi baku mengenai UKM secara universal. Sementara itu, UKM dan *entrepreneurship* juga tidak dapat dipisahkan dari situasi politik dalam negeri dan budaya masyarakat setempat.

<sup>31</sup> Zainuddin Djafar, op.cit. pp. 90-91.

<sup>32</sup> Ibid. pp. 94-95.

<sup>33</sup> Asmelash Beyene. *Enhancing the Competitiveness and Productivity of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Africa : An Analysis of Differential Roles of National Governments Through Improved Support Services*. Africa Development, Vol. XXVII, No.3, 2002, pp. 130-156. Council for the Development of Social Science Research in Africa, 2002. (ISSN 0850-3907).

<sup>34</sup> UN-ECE Operational Activities. *Workshop on "SMEs-Their Role in Foreign Trade*. Kyiv, 13-14 November 1997. <http://www.unecce.org> (diakses tanggal 23 November 2007).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chaipat Poonpatpibul dan Watsaya Limthammahisorn mengenai peran Bank Sentral Thailand dalam menyediakan akses finansial bagi sektor UKM,<sup>35</sup> menunjukkan bahwa informasi yang asimetris antara pihak perbankan dan sektor UKM adalah hambatan utama bagi UKM terhadap akses modal. Sebuah penelitian lainnya oleh Nurul Indarti dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada,<sup>36</sup> mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan sumber modal mempengaruhi kesuksesan bisnis UKM secara signifikan. Lebih Lanjut, Indarti menyatakan bahwa akses terhadap kapital, pemasaran, dan teknologi, merupakan faktor-faktor yang menentukan kesuksesan UKM, sementara aspek legalitas dapat menjadi penghambat bagi upaya pengembangan UKM dalam negeri.

Mengenai pengembangan UKM di Indonesia, Mitsuhiro Hayashi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pengembangan UKM sudah cukup relevan, namun kebijakan tersebut tidak diiringi oleh upaya implementasi yang selaras.<sup>37</sup> Dengan kata lain, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara perekonomian nasional tidak memiliki kapabilitas dan program kerja yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing UKM domestik.

## **1.6. Definisi Konsep**

### **1.6.1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Secara universal, belum ada definisi yang baku mengenai sektor UKM. Setiap negara memiliki kebijakan dan persepsi masing-masing terhadap pengertian UKM. Sektor UKM di Thailand, didefinisikan sebagai sektor usaha kecil dan menengah yang menggunakan produk lokal sebagai sumber (bahan baku) utama, yang selaras dengan budaya masyarakat setempat dan disesuaikan dengan iklim permintaan global. Sektor UKM dapat bergerak di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa.<sup>38</sup> Di Indonesia, Kementerian Negara

<sup>35</sup> Chaipat Poonpatpibul and Watsaya Limthammahisorn. *Financial Access of SMEs in Thailand : What Are the Roles of the Central Bank?*. SEACEN's collaborative research on SMEs and the role of central bank. June 2005.

<sup>36</sup> Nurul Indarti. *Entrepreneurship dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Ardana Media, Yogyakarta. 2007.

<sup>37</sup> Mitsuhiro Hayashi. *Development of SMEs in the Indonesian Economy*. School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, Australian National University.

<sup>38</sup> <http://www.thaisme.com> (diakses tanggal 10 September 2007).

Koperasi dan UKM (Menneg KUKM) menjelaskan konsep usaha kecil sebagai basis usaha dengan jumlah maksimal aset inisiasi 200 juta rupiah, tidak termasuk aset tanah dan bangunan, dan dengan nilai penjualan maksimal 1 milyar rupiah pertahun. Menurut pengertian tersebut, usaha mikro termasuk dalam kategori jenis usaha kecil. Usaha menengah didefinisikan sebagai sektor usaha dengan nilai penjualan pertahun antara 1 milyar hingga 50 milyar rupiah.<sup>39</sup> Di Malaysia, pendefinisian yang baku terhadap sektor UKM sudah dipandang sebagai suatu kebutuhan mendasar. Sektor UKM di Malaysia dibagi berdasarkan jumlah pekerja dalam suatu industri atau berdasarkan total penjualan atau pendapatan industri selama satu tahun.<sup>40</sup>

Dalam penelitiannya mengenai pengembangan UKM di Afrika, Beyene menggunakan konsep SMIs (*Small and Medium Scale Industries*) dan SEs (*Small Enterprises*). SMIs mengacu pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor manufaktur, sementara SEs didefinisikan sebagai aneka usaha kecil yang bergerak dalam bidang manufaktur, perdagangan, dan jasa.<sup>41</sup>

Menurut laporan UNCTAD mengenai kemajuan sektor UKM di negara-negara berkembang, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pengembangan sektor UKM. Aspek-aspek tersebut adalah : kebijakan pemerintah (*general policy environment for enterprises*), aspek legalitas (*legal and regulatory environment*), sarana dan prasarana pendukung (*business development services*), akses finansial (*access to finance*), dan hubungan sektor publik dan swasta (*public-private sector dialogue*).<sup>42</sup>

#### 1. Kebijakan Pemerintah (*general policy environment for enterprises*)

Dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor UKM dapat terlihat dari perumusan kebijakan industri dan perdagangan yang pro-pertumbuhan ekonomi UKM. Setiap negara memiliki strategi masing-masing dalam mempromosikan pengembangan UKM. Kebijakan pemerintah yang

<sup>39</sup> Tulus Tambunan. *Entrepreneurship Development : SMEs In Indonesia*. Journal of Developmental Entrepreneurship. 2007 Mar 1;12(1) 95-118. In: ABI/INFORM Global [database on the Internet] [cited 2007 Sep 22]. Available from: <http://www.proquest.com/>; Document ID: 1282545691.

<sup>40</sup> <http://www.smeinfo.com.my> (diakses tanggal 3 Maret 2008).

<sup>41</sup> Asmelash Beyene, op.cit.

<sup>42</sup> UNCTAD. *Growing Micro and Small Enterprises in LDCs (The "Missing Middle" in LDCs : Why Micro and Small Enterprises Are Not Growing)*. UNCTAD/ITE/TEB/5. <http://www.unctad.org> (diakses tanggal 7 September 2007).

selaras dengan era globalisasi ekonomi, akan menekankan perlunya pendekatan *market-oriented*, promosi ekspor, dan mengupayakan pengembangan UKM melalui pemasukan FDI (*Foreign Direct Investment*).<sup>43</sup> Faktor FDI dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan UKM, karena FDI merupakan sumber modal yang signifikan bagi negara-negara berkembang, terutama negara dalam perekonomian transisi seperti Indonesia. Salah satu kesulitan yang dialami sektor UKM dalam negeri adalah sulitnya memperoleh modal usaha. FDI dapat berperan sebagai *capital source* bagi para praktisi UKM. Dengan FDI, produktifitas UKM nasional dapat ditingkatkan, dan secara langsung dapat memberikan dampak positif terhadap aktifitas perekonomian dan perdagangan.

## 2. Aspek Legalitas (*legal and regulatory environment*)

Legalitas mengacu pada proses registrasi dan perijinan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha.<sup>44</sup> Hambatan dalam aspek legalitas dapat mengurangi fleksibilitas dan kapabilitas UKM dalam menjalankan bisnis. Kemudahan-kemudahan yang diberikan terhadap UKM dalam mengurus berbagai proses registrasi dan perijinan akan mendorong kinerja UKM dalam perdagangan.

## 3. Sarana dan Prasarana Pendukung (*business development services*)

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengembangan UKM juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan usaha, adalah : infrastruktur, aplikasi teknologi, akses terhadap informasi, kemampuan perencanaan bisnis dan pemasaran, serta tingkat pendidikan dan keahlian.

## 4. Akses Finansial (*access to finance*)

Akses finansial mengacu pada kemampuan sektor UKM untuk memperoleh penambahan modal. Sumber modal yang potensial dapat berasal dari tabungan pribadi, keluarga, tabungan masyarakat, dan sistem kredit perbankan.<sup>45</sup> Akses finansial bagi sektor UKM juga terkait dengan kebijakan pemerintah (peraturan perbankan dan aspek legalitas) dan informasi yang simetris.

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Nurul Indarti, op.cit.

## 5. Hubungan Pemerintah dan Sektor Swasta (*public-private sector dialogue*)

Aspek tersebut mengacu pada hubungan antara pemerintah dan sektor swasta yang berkaitan dengan penyebaran informasi (sosialisasi) mengenai kebijakan pembangunan pemerintah. Hubungan yang kondusif antara keduanya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu negara dalam sistem internasional.<sup>46</sup>

Kelima aspek tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan UKM di suatu negara. Kebijakan pemerintah merupakan gerbang utama yang menentukan arah pengembangan UKM. Aspek-aspek pendukung lainnya juga hanya dapat terpenuhi apabila negara (pemerintah) menyediakan iklim usaha yang kondusif dan mekanisme pengimplementasian yang sinergis dengan perumusan kebijakan nasional.

### 1.6.2. Pasar Tunggal

Peter J. Lloyd merumuskan konsep Pasar Tunggal sebagai "*The Law of One Price*".<sup>47</sup> Mekanisme Pasar Tunggal mengacu pada pembentukan *European Economic Community* (EEC) melalui *Treaty of Rome* pada tahun 1957. Konsep Pasar Tunggal versi Eropa didefinisikan sebagai "*Four Freedom*" yang terdiri dari kebebasan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Pembentukan Pasar Tunggal juga membutuhkan penerapan "kebijakan bersama", yaitu dalam hal kebijakan perdagangan eksternal (dengan negara non-anggota), kebijakan pertanian, transportasi, dan kompetisi.

Menurut Lloyd, ide utama Pasar Tunggal adalah untuk menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap *source* (asal produk) dalam pasar regional.<sup>48</sup> Kebebasan arus barang, jasa, dan faktor lainnya secara regional, akan menciptakan pasar tunggal yang tidak lagi memperhitungkan hambatan geografis. Implementasi konsep Pasar Tunggal yang efektif, perlu diiringi pula oleh mekanisme regional dan perumusan kebijakan bersama yang menjamin

<sup>46</sup> UNCTAD, *Growing Micro and Small Enterprises in LDCs (The "Missing Middle" in LDCs : Why Micro and Small Enterprises Are Not Growing)*, op.cit.

<sup>47</sup> Peter J Lloyd. *What Is a Single Market? An Application to the Case of ASEAN*. ASEAN Economic Bulletin. 2005 Dec 1;22(3) 251-265. In: ABI/INFORM Global [database on the Internet] [cited 2007 Sep 22]. Available from: <http://www.proquest.com/>; Document ID: 996115181.

<sup>48</sup> Ibid.

kebebasan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja, baik antar negara anggota maupun di dalam wilayah masing-masing negara.

Dalam *Vientienne Action Program (VAP)*,<sup>49</sup> dirumuskan bahwa untuk mencapai komitmen Pasar dan Basis Produksi Tunggal ASEAN, kebebasan arus barang adalah kondisi minimum yang harus dicapai. Untuk mendorong terciptanya kondisi tersebut, *tariff* dan *non-tariff barriers* akan dihilangkan secara bertahap, yaitu mengeliminasi *tariff barrier* untuk pergerakan barang (produk) pada 2010 untuk ASEAN-6 dan 2015 untuk CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam). Aspek-aspek *non-tariff barrier* akan dikaji secara lebih transparan untuk selanjutnya dihilangkan. *Tariff* dan *non-tariff barrier* merupakan kebijakan perdagangan internasional yang umum diaplikasikan dalam bidang impor. Hady<sup>50</sup> merumuskan kebijakan perdagangan internasional sebagai tindakan dan peraturan yang dirumuskan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perindustrian dalam negeri. *Barrier* dalam bidang impor dimaksudkan untuk melindungi usaha dalam negeri dari kompetisi yang timbul akibat perdagangan internasional, khususnya kompetisi dari produk impor.

#### 1. Tariff Barrier (Hambatan tarif bea masuk)

Tarif merupakan hambatan dalam perdagangan dalam bentuk pajak yang dikenakan terhadap barang ekspor atau impor. Pada umumnya, tarif dikenakan terhadap barang impor sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dan tenaga kerja dalam negeri dari persaingan oleh produk asing di pasar domestik.<sup>51</sup>

Menurut Hady,<sup>52</sup> tujuan kebijakan terhadap tarif bea masuk dapat dibedakan sebagai tarif proteksi, yaitu penerapan tarif untuk mencegah atau membatasi impor barang tertentu, dan tarif *revenue*, yaitu penerapan tarif impor untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan tujuan tersebut, fungsi tarif bea masuk dapat diuraikan sebagai berikut : (1) fungsi mengatur, yaitu untuk melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri; (2) fungsi *budgeter*, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan negara; (3) fungsi demokrasi, yaitu penetapan tarif impor melalui persetujuan DPR; dan (4) fungsi pemerataan, yaitu sebagai upaya untuk pemeratakan distribusi pendapatan

<sup>49</sup> *Vientienne Action Program (VAP)*, 10<sup>th</sup> ASEAN Summit, Laos-Vietnam. 29 November 2004.

<sup>50</sup> Hamdy Hady. *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Buku kesatu. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. p. 65.

<sup>51</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*. Putra Abardin. 2001. p. 130.

<sup>52</sup> Hamdy Hady, op.cit.

nasional. Diskriminasi terjadi apabila dua jenis barang yang serupa dari dua negara berbeda, dikenakan tarif bea masuk yang berbeda. Dalam mekanisme integrasi ekonomi regional, khususnya Pasar Tunggal ASEAN, dikenal prinsip non-diskriminasi terhadap produk impor yang berasal dari negara-negara anggota, dimana keringanan bea masuk yang diberikan terhadap salah satu negara anggota, harus pula diberlakukan untuk anggota lainnya.

## 2. Non-Tariff Barrier (Hambatan non tarif)

*Non-tariff barrier* diaplikasikan sebagai reaksi terhadap semakin maraknya perdagangan bebas yang mendorong eliminasi tarif dalam sistem perdagangan internasional. Hambatan-hambatan non tarif dirumuskan oleh pemerintah untuk memperoleh manfaat yang sama seperti dalam penerapan *tariff barrier*. Menurut Hady, kebijakan *non-tariff barrier* yang dirumuskan oleh pemerintah dalam mekanisme perdagangan internasional adalah berbagai peraturan dan kebijakan (selain tarif) yang dapat menimbulkan gangguan, sehingga mengurangi potensi dan manfaat perdagangan internasional.<sup>53</sup>

Pembatasan terhadap intensitas perdagangan internasional melalui kebijakan non-tarif dapat dilakukan, antara lain dengan penerapan sistem kuota, pemberlakuan *product regulations*, pemberian subsidi oleh pemerintah, dan praktek *dumping*.<sup>54</sup> Kuota adalah dibatasinya produk impor atau ekspor secara kuantitatif dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan konsumen dan sektor industri.<sup>55</sup> Pemberlakuan sistem kuota dinilai sebagai hambatan yang lebih berat jika dibandingkan dengan hambatan tarif bea masuk yang lebih fleksibel.<sup>56</sup> Hambatan non-tarif lainnya adalah *product regulations* yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Regulasi merupakan kebijakan-kebijakan non-tarif yang dikenakan terhadap produk sebagai persyaratan perdagangan. Peraturan-peraturan yang terlibat didalamnya dapat berupa peraturan standardisasi kesehatan dan sanitasi, kandungan kimiawi, jaminan kualitas produk dan kemasan produk, kebijakan kebudayaan, dan hambatan-hambatan dalam bidang promosi dan pemasaran.

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan. *International Relations : The Key Concepts*. Routledge, London. 2002. pp. 217-219.

<sup>55</sup> Hamdy Hady, op.cit.

<sup>56</sup> Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, op.cit.

Pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap sektor industri dalam negeri juga dapat dikategorikan sebagai hambatan non-tarif. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah yang diaplikasikan untuk memberikan perlindungan atau bantuan terhadap industri domestik. Bentuk bantuan dalam subsidi pemerintah dapat berupa regulasi pajak, fasilitas kredit, dan subsidi harga produk. Subsidi bertujuan untuk menambah kapasitas produksi dalam negeri, mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, dan memberikan kemampuan pada produsen domestik untuk menjual produk dengan harga yang lebih murah dari produk impor.<sup>57</sup> Dengan kata lain, pemberian subsidi dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan asing atau produk-produk impor yang semakin kompetitif. Bentuk *non-tariff barrier* lainnya adalah praktek *dumping*, yaitu menjual produk ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar domestik.

#### **1.7. Pembatasan Penelitian**

Analisis dalam pemikiran ini akan difokuskan pada aspek kebijakan pemerintah (*general policy environment for enterprises*) terhadap upaya peningkatan daya saing UKM. Aspek tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan pemerintah merupakan gerbang utama bagi masyarakat dalam merealisasikan dan mengembangkan industrinya, karena suatu kebijakan dapat memberikan kemudahan, atau sebaliknya, menjadi penghambat bagi suatu wacana pembangunan masyarakat.

Subjek penelitian ini akan difokuskan pada strategi UKM di Indonesia, dengan strategi UKM Thailand dan Malaysia sebagai *lesson learned*, dalam rangka menghadapi perkembangan wacana Pasar Tunggal ASEAN 2015. Namun dalam membahas peran sektor UKM secara internasional, faktor kesuksesan pengembangan UKM di China tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, meningkatnya iklim persaingan di masa yang akan datang, tidak hanya akan terjadi antar negara anggota ASEAN, namun juga antara ASEAN dan China.

Thailand dan Malaysia, seperti halnya Indonesia, berada dalam satu kawasan, menghadapi tantangan internasional yang serupa, dan sama-sama terlibat dalam perencanaan penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Sektor UKM

---

<sup>57</sup> Hamdy Hady, *op.cit.*

Thailand dan Malaysia juga memiliki rekam jejak yang paling baik di kawasan Asia Tenggara. Menurut *Forbes Asia*, Malaysia dan Thailand memiliki masing-masing sembilan dan lima industri UKM yang tergolong ke dalam 200 perusahaan terbaik di Asia dengan pendapatan kurang dari satu milyar USD per tahun.<sup>58</sup> Segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (*IMT Growth Triangle*) juga merupakan salah satu pertimbangan dalam penelitian ini. IMT-GT dicanangkan pada tahun 1993 oleh Presiden Suharto dari Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, dan Perdana Menteri Thailand, Chuan Leekpai. Pembentukan IMT-GT didirikan sebagai mesin pertumbuhan untuk memperkuat hubungan ekonomi, sosial, dan kultural di antara ketiga negara partisipan.<sup>59</sup> Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembangunan di Malaysia dan Thailand juga dapat mendorong terciptanya perbaikan kondisi perekonomian regional di kawasan ASEAN.

#### **1.8. Hubungan Antar Konsep**

Konsep Pasar Tunggal yang berbasiskan perdagangan bebas merupakan inti dari ASEAN *Economic Community*. Persyaratan teknis untuk membentuk pasar tunggal adalah dihilangkannya *tariff* dan *non-tariff barrier* untuk kegiatan perdagangan intra-ASEAN. Dampak langsung dari penerapan Pasar Tunggal adalah kebebasan arus barang, jasa, kapital, dan tenaga ahli. Sebagai bagian dari globalisasi, Pasar Tunggal memberikan kesempatan bagi sektor industri dalam negeri untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan produktifitas. Namun pada dasarnya, Pasar Tunggal juga akan meningkatkan kompetisi intra-kawasan karena produk unggulan negara-negara ASEAN yang tidak bersifat komplementer. Permasalahan serupa juga dihadapi para anggota ASEAN dalam kerjasama ACFTA.

Di satu sisi, komitmen negara-negara ASEAN dalam pembentukan Pasar Tunggal belum menunjukkan hasil yang signifikan. Friksi politik juga masih kerap terjadi di ASEAN. Kuatnya birokrasi pemerintahan di lingkup negara-negara ASEAN menyebabkan kerjasama ekonomi intra-kawasan belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, faktor China perlu dihadapi bersama oleh negara-negara

<sup>58</sup> AFP. *Taiwan Leads China in Best SMEs List : Forbes*. <http://www.livemint.com> (diakses tanggal 4 Maret 2008).

<sup>59</sup> <http://www.smidec.gov.my/event/imtgt/index.htm> (diakses tanggal 4 Maret 2008).

ASEAN dalam mekanisme integrasi ekonomi. Dalam kaitannya dengan kerjasama ekonomi, China dapat berperan sebagai kompetitor sekaligus *partner* ekonomi ASEAN yang paling berpengaruh. Kompetitor, karena karakteristik perdagangan ASEAN-China, seperti halnya sifat perdagangan intra-ASEAN, bersifat saling kompetitif. Sebagai *partner*, karena China telah berkomitmen untuk meningkatkan investasinya di ASEAN.<sup>60</sup> Selain itu, ASEAN juga mengalami surplus perdagangan yang cukup signifikan terhadap China.<sup>61</sup>

Salah satu sektor yang akan terpengaruh oleh penerapan Pasar Tunggal ASEAN dan *China factor* adalah sektor UKM. Sektor UKM perlu dipertahankan dan dikembangkan, karena UKM merupakan stabilisator sosial-ekonomi bagi negara-negara berkembang di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Untuk menghadapi perubahan iklim kompetisi secara regional, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing sektor UKM. Dalam perdagangan intra-ASEAN, sektor UKM tidak hanya akan bersaing dengan usaha besar, namun juga dengan UKM regional (UKM yang berasal dari sesama negara anggota ASEAN). Sementara itu, sektor UKM regional ASEAN juga akan berhadapan dengan sektor industri China. Dalam penelitian ini, peran pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan UKM, akan dibandingkan dengan strategi pemerintah Thailand dan Malaysia terhadap pengembangan sektor UKM di negaranya masing-masing. Selanjutnya, dapat dilihat, bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap daya saing sektor UKM secara global.

### **I.9. Operasionalisasi Konsep**

Pasar Tunggal ASEAN memiliki dua indikator utama, yaitu *zero tariff barrier* dan dihapuskannya *non-tariff barrier*. Indikator pendukung lainnya adalah liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan kebebasan arus modal, barang, jasa, dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, daya saing sektor UKM akan dianalisis melalui satu indikator, yaitu dari sudut pandang kebijakan pemerintah. Tabel I.1. menunjukkan operasionalisasi konsep ke dalam indikator dan sub-indikator.

<sup>60</sup> Zainuddin Djafar, op.cit. p 128.

<sup>61</sup> Ibid. p. 78.

Tabel I.1. Operasionalisasi Konsep

Variabel/Konsep	Indikator	Sub-Indikator
Pasar Tunggal ASEAN 2015	Liberalisasi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Zero tariff barrier</i></li> <li>▪ Penghapusan <i>non-tariff barrier</i></li> <li>▪ Kebebasan arus barang, jasa, modal, tenaga kerja</li> </ul>
Sektor UKM	Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promosi UKM</li> <li>▪ Kebijakan <i>market-oriented</i></li> <li>▪ Upaya pemodalan UKM melalui FDI</li> <li>▪ Strategi diferensiasi dan spesialisasi</li> <li>▪ Prinsip <i>outward-looking</i></li> </ul>

#### 1.10. Perumusan Asumsi dan Hipotesis

Dari pemaparan tersebut, ada beberapa asumsi yang dapat dirumuskan, yaitu bahwa berkembangnya *China factor* dan penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 akan meningkatkan iklim persaingan (kompetisi) regional, yang juga akan dihadapi oleh sektor UKM karena kondisi perekonomian intra-ASEAN dan ASEAN-China yang cenderung bersifat non-komplementer. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa dalam menghadapi kekuatan ekonomi China, negara-negara ASEAN tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme atau kebijakan regional untuk dapat mengurangi pengaruh China di kawasan.

Berhasil atau tidaknya sektor UKM nasional dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan sektor UKM dalam meningkatkan daya saing serta membangun kapabilitas UKM yang selaras dengan mekanisme liberalisasi perdagangan. Sesuai dengan arah penelitian, penulis mengajukan beberapa hipotesa, yaitu bahwa : (1) Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan dampak positif dari penerapan Pasar Tunggal ASEAN dan perkembangan ekonomi China; (2) kebijakan pemerintah Indonesia belum dapat mendorong pengembangan sektor UKM dalam negeri secara optimal, sehingga kondisi sektor UKM saat ini belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing secara internasional, terutama dalam menghadapi China dan penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015; dan (3) daya saing sektor UKM Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan regional, masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor UKM Thailand dan Malaysia.

### **1.11. Model Analisis**

Gambar 1.1 (halaman 26) menjelaskan secara sederhana, bahwa kebijakan UKM yang dirumuskan oleh pemerintah dapat mempengaruhi daya saing sektor UKM negara yang bersangkutan di level internasional, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi China dan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Pengaruh China di kawasan Asia Tenggara semakin kuat dengan hadirnya rencana penerapan ACFTA mulai tahun 2010. Sebagai salah satu upaya untuk menyaingi pertumbuhan ekonomi China, negara-negara ASEAN juga telah sepakat untuk merealisasikan Pasar Tunggal ASEAN pada 2015. Perkembangan Ekonomi China dan rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN membawa tantangan dan implikasi tersendiri terhadap kondisi perekonomian nasional dan regional kawasan. Dalam rangka meredam dampak negatif liberalisasi perdagangan (Pasar Tunggal ASEAN dan ACFTA), Thailand, Malaysia, dan Indonesia, memiliki strategi (kebijakan) UKM domestiknya masing-masing. Model analisis ini juga menggambarkan perbedaan level daya saing Indonesia dengan Thailand dan Malaysia. Keberhasilan Thailand dan Malaysia dalam mengelola sektor UKM di negaranya masing-masing, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saingnya secara global.

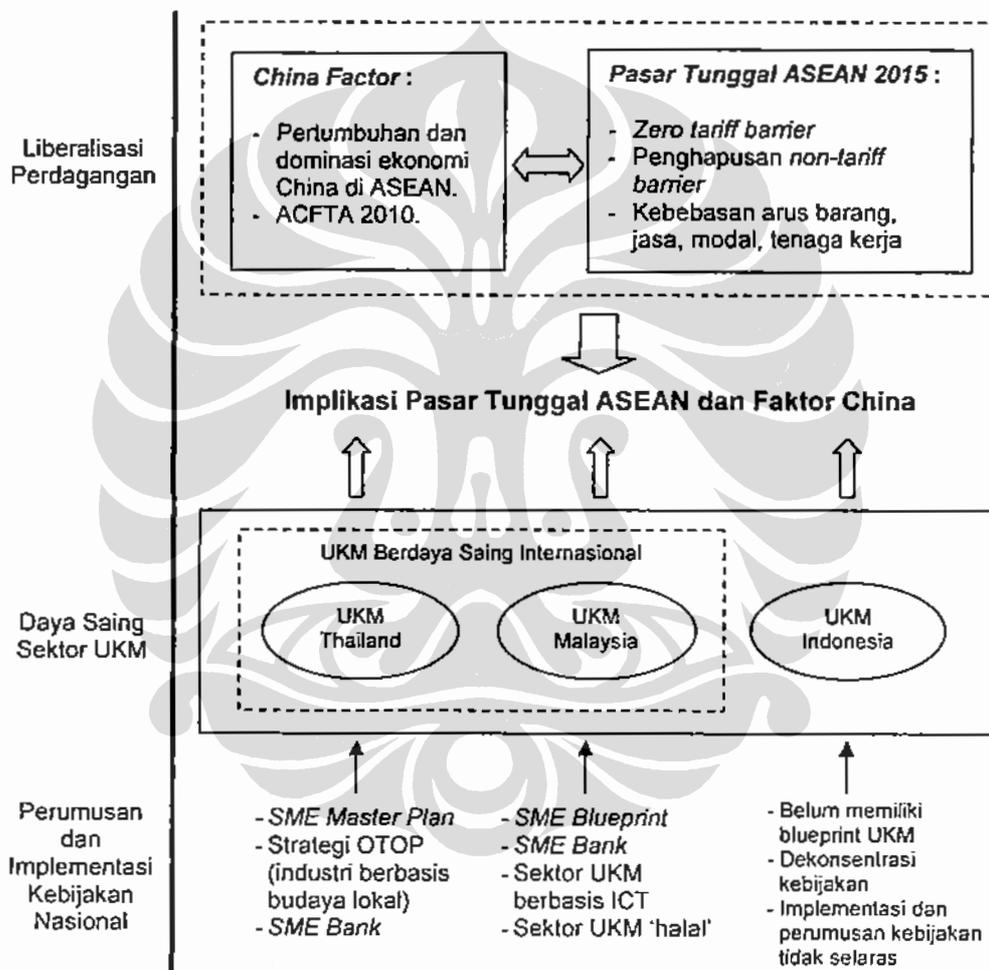
### **1.12. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan tujuan penelitian, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran pemerintah Indonesia, Thailand, dan Malaysia, terhadap upaya peningkatan daya saing sektor UKM-nya masing-masing. Analisa juga akan dilakukan terhadap implikasi apa saja yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi China dan penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015.

Penelitian ini akan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi literatur. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain melalui Badan Pusat Statistik, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perindustrian

Republik Indonesia. Data atau informasi lainnya diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, serta penelusuran internet. Studi literatur dilakukan melalui penelusuran situs internet dan juga dilakukan di beberapa perpustakaan, antara lain perpustakaan *Centre for Strategic and International Studies* Jakarta dan perpustakaan jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

Gambar I.1. Model Analisis Penelitian.



### **I.13. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dan dijabarkan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab berikut :

**Bab I Pendahuluan**, meliputi penjelasan mengenai latar belakang topik penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian.

**Bab II Faktor China dan Perkembangan Integrasi Ekonomi di ASEAN**, menjelaskan beberapa hal, antara lain bagaimana kekuatan ekonomi China mempengaruhi kondisi perekonomian regional ASEAN; perkembangan konsep Pasar Tunggal ASEAN; serta komitmen yang dimiliki para anggotanya untuk mewujudkan ASEAN *Economic Community* pada 2015. Bagian ini juga akan membahas aspek-aspek penting dan implikasi yang dapat ditimbulkan dari penerapan Pasar Tunggal ASEAN, khususnya terhadap stabilitas sosial-ekonomi nasional.

**Bab III Strategi Thailand, Malaysia, dan Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor UKM Sebagai *Non-State Actor***, akan menjabarkan secara singkat fenomena perkembangan sektor UKM sebagai *non-state actor* dalam sistem ekonomi internasional. Perkembangan sektor UKM secara global, tidak terlepas dari kesuksesan China dalam pemberdayaan UKM. Pada bagian ini juga akan dijelaskan peran (strategi) pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia secara umum dalam upaya pengembangan UKM di negaranya masing-masing.

**Bab IV Strategi Pengembangan UKM Domestik dan Regional dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan**, akan menjelaskan tantangan apa saja yang dihadirkan oleh Pasar Tunggal ASEAN dan perkembangan ekonomi China terhadap perekonomian nasional dan regional kawasan. Pembahasan pada bagian ini juga akan menghadirkan rekomendasi analisis, kebijakan, dan institusional terhadap upaya peningkatan daya saing sektor UKM Indonesia dan sektor UKM regional yang lebih selaras dengan liberalisasi perdagangan, terutama dalam kaitannya dengan Pasar Tunggal ASEAN 2015 dan *China factor*.

**Bab V Kesimpulan**, akan memberikan konklusi dari hasil penelitian serta signifikansinya bagi bidang keilmuan hubungan internasional dan sektor perekonomian nasional.